



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 132.A / KPTS / VII / 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TINGKAT DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas ketahanan dan kemampuan keluarga yang meliputi peningkatan kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian dan mental spiritual yang dilandasi oleh nilai – nilai luhur budaya bangsa dan agama melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa upaya pengembangan kualitas ketahanan dan kemampuan keluarga merupakan tanggung jawab Bersama orang tua / keluarga, masyarakat, institusi masyarakat serta pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Desa Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
8. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kmapung Keluarga Berkualitas;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala DPPKB Nomor : 56/843.4/2023 Perihal: Penyampaian Permohonan SK Pembentukan Kmapung KB dan GDPK.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, merupakan satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
- KETIGA : Sasaran Program Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu meliputi :
- a. Penyediaan data dan peningkatan cakupan administrasi kependudukan;
 - b. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat;
 - c. Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga;
 - d. Penataan lingkungan keluarga.
- KEEMPAT : Capaian Program Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. Tercapainya data dan peningkatan cakupan pemenuhan administrasi kependudukan;
 - b. Terlaksananya advokasi dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat;
 - c. Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan termasuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui program kesehatan berbasis masyarakat atau unit – unit pelayanan dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
 - d. Terdapat pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan resiko kejadian stunting;

- e. Meningkatnya cakupan layanan dan akses Pendidikan;
- f. Meningkatnya cakupan layanan jaminan dan perlindungan social pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan;
- g. Terdapat kegiatan pemberdayaan ekonommi keluarga dan penataan lingkungan, peningkatan akses air bersih serta sanitasi dasar.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat, APBDesa serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Ekonomi & Pemb	
Kadis DPPKB	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 7 Agustus 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di sofifi;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Camat Se-Kabupaten Halmahera Barat di Tempat,
7. Kades Se-Kabupaten Halmahera Barat di Tempat,
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 132 . A /KPTS/ VIII /2023
TANGGAL 7 AGUSTUS 2023

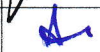
TENTANG : PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT DESA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Gufasa	JAILOLO	Dibentuk Tahun 2023
2	Guamaadu		Dibentuk Tahun 2023
3	Jalan Baru		Dibentuk Tahun 2023
4	Gamlamo		Dibentuk Tahun 2023
5	Soakonora		Dibentuk Tahun 2023
6	Galala		Dibentuk Tahun 2023
7	Bobanehena		Dibentuk Tahun 2023
8	Payo		Dibentuk Tahun 2023
9	Bobo		Dibentuk Tahun 2023
10	Saria		Dibentuk Tahun 2023
11	Idamdehe		Dibentuk Tahun 2023
12	Idamdehe Gamsungi		Dibentuk Tahun 2023
13	Marimabati		Dibentuk Tahun 2023
14	Gamtala		Dibentuk Tahun 2023
15	Lolori		Dibentuk Tahun 2023
16	Taboso		Dibentuk Tahun 2023
17	Hoku-hoku Kie		Dibentuk Tahun 2023
18	Acango		Dibentuk Tahun 2023
19	Tedeng		Dibentuk Tahun 2023
20	Akediri		Dibentuk Tahun 2023
21	Porniti		Dibentuk Tahun 2023
22	Bukumatiti		Dibentuk Tahun 2023
23	Todowongi		Dibentuk Tahun 2023
24	Tuada		Dibentuk Tahun 2023
25	Matui		Dibentuk Tahun 2023
26	Buku Bualawa		Dibentuk Tahun 2023
27	Tauro		Dibentuk Tahun 2023
28	Hatebicara		Dibentuk Tahun 2023
29	Guaeria		Dibentuk Tahun 2023
30	Pateng		Dibentuk Tahun 2023
31	Bobojiko		Dibentuk Tahun 2023
32	Ulo		Dibentuk Tahun 2023
33	Kuripasai		Dibentuk Tahun 2023
34	Bukumaadu		Dibentuk Tahun 2023
35	Susupu	SAHU	Dibentuk Tahun 2023
36	Lako Akelamo		Dibentuk Tahun 2023
37	Taruba		Dibentuk Tahun 2023
38	Todahe		Dibentuk Tahun 2023
39	Sasur		Dibentuk Tahun 2023
40	Goro-goro		Dibentuk Tahun 2023
41	Tacim		Dibentuk Tahun 2023
42	Taraudu		Dibentuk Tahun 2023
43	Golo		Dibentuk Tahun 2023
44	Jarakore		Dibentuk Tahun 2023
45	Ropu Tengah Balu		Dibentuk Tahun 2023
46	Dere		Dibentuk Tahun 2023
47	Balisoan		Dibentuk Tahun 2023
48	Balisoan Utara		Dibentuk Tahun 2023
49	Sasur Pantai		Dibentuk Tahun 2023
50	Loce	SAHU TIMUR	Dibentuk Tahun 2023
51	Idam Gamlamo		Dibentuk Tahun 2023
52	Gamomeng		Dibentuk Tahun 2023
53	Akelamo		Dibentuk Tahun 2023
54	Taraudu Kusu		Dibentuk Tahun 2023
55	Awer		Dibentuk Tahun 2023

α

56	Aketola		Dibentuk Tahun 2023
57	Tibobo		Dibentuk Tahun 2023
58	Hoku-hoku Gam		Dibentuk Tahun 2023
59	Gamnyial		Dibentuk Tahun 2023
60	Golago Kusuma		Dibentuk Tahun 2023
61	Ngaon		Dibentuk Tahun 2023
62	Gamsungi		Dibentuk Tahun 2023
63	Taba Campaka		Dibentuk Tahun 2023
64	Campaka		Dibentuk Tahun 2023
65	Sidodadi		Dibentuk Tahun 2023
66	Air Panas		Dibentuk Tahun 2023
67	Sidangoli Gam	JAILOLO SELATAN	Dibentuk Tahun 2023
68	Sidangoli Dehe		Dibentuk Tahun 2023
69	Domato		Dibentuk Tahun 2023
70	Tataleka		Dibentuk Tahun 2023
71	Gamlenge		Dibentuk Tahun 2023
72	Bicamaahi		Dibentuk Tahun 2023
73	Tuguraci		Dibentuk Tahun 2023
74	Akeara		Dibentuk Tahun 2023
75	Akelaha		Dibentuk Tahun 2023
76	Dodinga		Dibentuk Tahun 2023
77	Tewe		Dibentuk Tahun 2023
78	Toniku		Dibentuk Tahun 2023
79	Rioribati		Dibentuk Tahun 2023
80	Tabadamai		Dibentuk Tahun 2023
81	Moiso		Dibentuk Tahun 2023
82	Braha		Dibentuk Tahun 2023
83	Bangkit Rahmat		Dibentuk Tahun 2023
84	Bobane Dano		Dibentuk Tahun 2023
85	Suka Damai		Dibentuk Tahun 2023
86	Hijrah		Dibentuk Tahun 2023
87	Ratem		Dibentuk Tahun 2023
88	Tosoa	IBU SELATAN	Dibentuk Tahun 2023
89	Tabobol		Dibentuk Tahun 2023
90	Baru		Dibentuk Tahun 2023
91	Nanas		Dibentuk Tahun 2023
92	Gamsungi		Dibentuk Tahun 2023
93	Bataka		Dibentuk Tahun 2023
94	Talaga		Dibentuk Tahun 2023
95	Tobelos		Dibentuk Tahun 2023
96	Gamkonora		Dibentuk Tahun 2023
97	Sarau		Dibentuk Tahun 2023
98	Ngawet		Dibentuk Tahun 2023
99	Adu		Dibentuk Tahun 2023
100	Gamsida		Dibentuk Tahun 2023
101	Ngalo Ngalo		Dibentuk Tahun 2023
102	Tuguaer		Dibentuk Tahun 2023
103	Togola Wayoli	IBU	Dibentuk Tahun 2023
104	Togola Sangir		Dibentuk Tahun 2023
105	Tahafo		Dibentuk Tahun 2023
106	Tongute Ternate		Dibentuk Tahun 2023
107	Akesibu		Dibentuk Tahun 2023
108	Maritango		Dibentuk Tahun 2023
109	Kie Ici		Dibentuk Tahun 2023
110	Tongute Goin		Dibentuk Tahun 2023
111	Tongute Sungi		Dibentuk Tahun 2023
112	Gam Ici		Dibentuk Tahun 2023
113	Gam Lamo		Dibentuk Tahun 2023
114	Naga		Dibentuk Tahun 2023
115	Soana Masungi		Dibentuk Tahun 2023
116	Tongute Ternate		Dibentuk Tahun 2023
117	Akeboso		Dibentuk Tahun 2023
118	Kampung Baru		Dibentuk Tahun 2023
119	Podol	TABARU	Dibentuk Tahun 2023
120	Tengowango		Dibentuk Tahun 2023

121	Togowo		Dibentuk Tahun 2023
122	Duono		Dibentuk Tahun 2023
123	Goin		Dibentuk Tahun 2023
124	Sangaji Nyeku		Dibentuk Tahun 2023
125	Tuguis		Dibentuk Tahun 2023
126	Togoreba Tua		Dibentuk Tahun 2023
127	Tukuoko		Dibentuk Tahun 2023
128	Soasangaji		Dibentuk Tahun 2023
129	Aru Jaya		Dibentuk Tahun 2023
130	Kedi	LOLODA	Dibentuk Tahun 2023
131	Soa – sio		Dibentuk Tahun 2023
132	Totala		Dibentuk Tahun 2023
133	Tolofuo		Dibentuk Tahun 2023
134	Tuguis		Dibentuk Tahun 2023
135	Tasye		Dibentuk Tahun 2023
136	Laba Besar		Dibentuk Tahun 2023
137	Laba Kecil		Dibentuk Tahun 2023
138	Bakun		Dibentuk Tahun 2023
139	Buo		Dibentuk Tahun 2023
140	Kahatola		Dibentuk Tahun 2023
141	Bosala		Dibentuk Tahun 2023
142	Salu		Dibentuk Tahun 2023
143	Bantoli		Dibentuk Tahun 2023
144	Linggua		Dibentuk Tahun 2023
145	Tomodo		Dibentuk Tahun 2023
146	Totala Jaya		Dibentuk Tahun 2023
147	Jano	LOTENG	Dibentuk Tahun 2023
148	Bakun Pantai		Dibentuk Tahun 2023
149	Barataku		Dibentuk Tahun 2023
150	Gamkahe		Dibentuk Tahun 2023
151	Pumadada		Dibentuk Tahun 2023
152	Baja		Dibentuk Tahun 2023
153	Tosomolo		Dibentuk Tahun 2023
154	Jangailulu		Dibentuk Tahun 2023
155	Bilote		Dibentuk Tahun 2023
156	Aruku		Dibentuk Tahun 2023

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Ekonomi & Pemb	
Kepala DPPKB	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG